

**ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
PADA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

WILLY ARDIWAN

NIT: 22314485

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Budget efficiency at the Survey and Mapping Section of the Sleman Regency Land Office created unequal consequences between routine land measurement services and strategic mapping programs. Regular services continued because they were supported by Non-Tax State Revenue, whereas activities dependent on the work unit budget experienced substantial restrictions. A qualitative descriptive-comparative approach was applied through semi-structured interviews, observation, and document analysis by comparing conditions before and after the policy. The findings show that approximately 50% of the land measurement service budget was initially withheld, while the orthophoto mapping budget was fully blocked throughout 2025. The target for land measurement services covering areas below 25 hectares decreased from 10,000 to 9,400 parcels in 2025 and from 9,500 to 4,750 parcels in 2026. More severe reductions occurred in strategic programs: the third-party Complete Systematic Land Registration parcel mapping target declined from 18,000 to 1,478 hectares, or 91.8%, while the outreach target fell from 38 to four documents, or 89.5%. Regular measurement *output* increased from approximately 600–700 to 1,200–1,300 parcels per month. However, this increase resulted mainly from backlog settlement and personnel reassignment rather than improved organizational efficiency. Measurement accuracy and service continuity were maintained through stronger quality control, although equipment calibration, maintenance, capital expenditure, field equipment, and orthophoto coverage were delayed. Budget efficiency therefore preserved routine services but weakened strategic mapping capacity and long-term land administration targets.

Keywords: budget efficiency, survey and mapping, land administration, strategic mapping, Sleman Land Office

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRACT.....	vii
INTISARI.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	21
1. Kebijakan Publik dan Dampak Kebijakan	21
2. Anggaran Sektor Publik	24
3. Efisiensi Anggaran	27
4. Administrasi Pertanahan	31
5. Seksi Survei dan Pemetaan	34
C. Kerangka Pemikiran.....	38
D. Pertanyaan Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Format Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Informan dan teknik pengumpulan informan.....	43

D.	Jenis dan Sumber Data	44
E.	Teknik Pengumpulan Data	46
F.	Teknik Analisis Data	49
BAB IV	GAMBARAN UMUM	52
A.	Gambaran Umum Kabupaten Sleman.....	52
B.	Gambaran Umum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.....	53
C.	Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	55
D.	Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman	57
E.	Profil Seksi Survei dan Pemetaan sebagai Fokus Penelitian	60
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	64
A.	Kondisi Seksi Survei dan Pemetaan Sebelum Dilaksanakan Efisiensi Anggaran	64
1.	Kondisi Anggaran dan Pembiayaan Kegiatan.....	64
2.	Kondisi Sumber Daya Manusia	66
3.	Kondisi Sarana dan Prasarana	67
4.	Pelaksanaan Kegiatan Teknis dan Pemetaan.....	68
5.	Pencapaian Target Sebelum Efisiensi	69
B.	Objek Efisiensi pada Seksi Survei dan Pemetaan	70
1.	Anggaran Layanan Pengukuran	70
2.	Kegiatan Peta Foto Tegak dan PTSL	71
3.	Belanja Modal dan Perangkat Kerja	73
4.	Pemeliharaan dan Kalibrasi Alat Ukur.....	73
5.	Bahan Operasional dan Dukungan Lapangan	74
6.	Komponen yang Tidak Menjadi Objek Efisiensi Langsung	75
C.	Kondisi Seksi Survei dan Pemetaan Setelah Dilaksanakan Efisiensi Anggaran.....	76
1.	Perubahan Pengelolaan dan Pencairan Anggaran	76
2.	Pergeseran Komposisi Kegiatan	77
3.	Kondisi Ketepatan Waktu Layanan Reguler	80
4.	Kondisi Akurasi dan Pengendalian Mutu.....	80

5. Kondisi Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Kerja	81
6. Kondisi Kegiatan Peta Dasar dan Program Strategis	82
7. Kondisi Respons Masyarakat dan Pemerintah Desa	83
8. Strategi Penyesuaian Unit Kerja	83
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran negara merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar bagi setiap instansi untuk melaksanakan program, kegiatan, dan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Anggaran tidak hanya memuat jumlah dana yang tersedia, tetapi juga mencerminkan prioritas kebijakan, target keluaran, jadwal kegiatan, kebutuhan sumber daya, serta tanggung jawab organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam sistem penganggaran berbasis kinerja, program dan kegiatan harus memiliki hubungan yang jelas dengan sumber daya yang digunakan serta keluaran yang akan dihasilkan. Struktur anggaran kementerian dan lembaga bahkan disusun berdasarkan program, kegiatan, klasifikasi rincian output, rincian output, serta komponen pembentuk keluaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa perubahan pada suatu komponen anggaran dapat memengaruhi proses pelaksanaan dan pencapaian keluaran kegiatan.

Pada tahun 2025, pengelolaan anggaran pemerintah menghadapi perubahan besar setelah ditetapkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Instruksi tersebut menetapkan efisiensi belanja negara sebesar Rp306.695.177.420.000,00, yang terdiri atas efisiensi belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta efisiensi Transfer ke Daerah sebesar kurang lebih Rp50,59 triliun. Pemerintah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan reviu anggaran sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Kebijakan tersebut berlaku sejak 22 Januari 2025 dan menjadi dasar bagi setiap instansi untuk menata kembali kegiatan, komponen belanja, serta target yang sebelumnya telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, efisiensi anggaran ditempatkan sebagai suatu fenomena kebijakan publik. Fenomena tersebut tidak hanya ditunjukkan oleh adanya keputusan pemerintah untuk menghemat belanja negara, tetapi juga oleh perubahan yang terjadi ketika kebijakan tersebut diterjemahkan pada tingkat kementerian, satuan kerja, dan unit teknis. Pada tingkat pelaksanaan, efisiensi dapat berbentuk pengurangan pagu, pemblokiran anggaran, penahanan sebagian dana, penundaan pengadaan, pengurangan target, perubahan metode kerja, pergeseran alokasi, atau pembatalan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56 Tahun 2025 selanjutnya mengatur mekanisme efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, revisi anggaran, pelaksanaan anggaran, serta penyesuaian indikator penilaian kinerja. Dengan demikian, kebijakan efisiensi tidak hanya mengubah besaran anggaran secara administratif, tetapi juga dapat mengubah kemampuan riil satuan kerja dalam melaksanakan rencana kegiatannya.

Secara konseptual, efisiensi anggaran tidak dapat disamakan dengan pemangkasan anggaran. Mardiasmo (2021) menjelaskan bahwa efisiensi menunjukkan hubungan antara sumber daya yang digunakan dengan keluaran yang dihasilkan. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan keluaran secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang proporsional. Pengertian tersebut menempatkan efisiensi sebagai ukuran kinerja, bukan sekadar ukuran rendahnya pengeluaran. Kusuma, Pambudi, dan Suprayitno (2019) juga mengukur efisiensi anggaran dengan menempatkan realisasi berbagai jenis belanja sebagai masukan dan capaian keluaran satuan kerja sebagai hasil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penilaian efisiensi harus mempertimbangkan hubungan antara anggaran dan output yang dihasilkan, bukan hanya melihat besarnya anggaran yang berhasil dikurangi.

Berdasarkan konsep tersebut, pengurangan anggaran baru dapat dinilai sebagai efisiensi apabila organisasi tetap mampu menjalankan tugas utamanya, mempertahankan kualitas keluaran, serta mencapai sasaran dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat. Sebaliknya, apabila pengurangan anggaran menyebabkan kegiatan utama tidak dapat dilaksanakan, target

diturunkan, kebutuhan teknis ditunda, atau kualitas pelayanan terganggu, kondisi tersebut lebih tepat dipahami sebagai keterbatasan anggaran daripada keberhasilan efisiensi. Rakhmadina dan Setyaningrum (2021) menunjukkan bahwa perubahan metode pelaksanaan kegiatan memang dapat menghasilkan penghematan dan meningkatkan jumlah keluaran. Namun, keberhasilan tersebut tetap membutuhkan perhitungan seluruh komponen biaya, penyesuaian kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi, struktur organisasi, dan perubahan proses kerja. Temuan ini memperlihatkan bahwa efisiensi tidak dapat diperoleh hanya dengan mengurangi dana, tetapi harus disertai perubahan metode yang memungkinkan keluaran tetap tercapai.

Perbedaan antara efisiensi dan pemangkasan menjadi penting karena pemotongan anggaran dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda pada setiap kegiatan. Pengurangan pada belanja yang tidak memiliki hubungan langsung dengan keluaran, seperti kegiatan seremonial atau pengeluaran yang dapat digantikan dengan metode yang lebih hemat, berpotensi meningkatkan efisiensi. Akan tetapi, pengurangan pada komponen utama yang secara langsung membentuk keluaran dapat mengurangi kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas. Dalam struktur anggaran berbasis kinerja, komponen utama merupakan aktivitas yang nilai biayanya berpengaruh langsung terhadap volume atau kualitas output. Dengan demikian, pemangkasan pada komponen utama harus dilakukan secara hati-hati karena dapat menyebabkan perubahan terhadap hasil yang seharusnya dicapai.

Pada unit kerja yang melaksanakan kegiatan lapangan, anggaran operasional tidak selalu dapat dikategorikan sebagai belanja pendukung yang mudah dikurangi. Biaya perjalanan, transportasi, peralatan, bahan operasional, dan pemeliharaan dapat menjadi masukan utama bagi pelaksanaan kegiatan. Mahfudin (2018), misalnya, menemukan bahwa belanja perjalanan dinas memiliki hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian kinerja dan output program kementerian atau lembaga. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengurangan belanja perjalanan atau mobilitas tidak selalu

menghasilkan efisiensi apabila kegiatan yang dilaksanakan memang mengharuskan petugas hadir secara langsung di lapangan.

Pemangkasan anggaran juga berpotensi menyebabkan tertundanya rencana kegiatan yang telah dijadwalkan. Hubungan tersebut terjadi ketika rencana kegiatan disusun berdasarkan jumlah anggaran, waktu, tenaga, peralatan, dan target tertentu, tetapi sumber daya yang tersedia kemudian berkurang. Dalam kondisi tersebut, satuan kerja harus melakukan revisi terhadap jadwal, volume, cakupan, atau metode pelaksanaan. Apabila sumber daya pengganti tidak tersedia, kegiatan dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Penundaan tersebut bukan sekadar perubahan waktu administratif, melainkan suatu masalah organisasi karena menimbulkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.

Eskandar (2022) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat menyebabkan tingginya deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi, meningkatnya kebutuhan revisi DIPA, serta penumpukan pelaksanaan anggaran pada akhir tahun. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pengendalian yang dilakukan secara berkala mampu memperkecil deviasi, memperbaiki realisasi anggaran, dan membantu pekerjaan kontraktual diselesaikan tepat waktu. Temuan tersebut mempertegas bahwa keterlambatan pelaksanaan rencana merupakan permasalahan yang harus dikendalikan karena dapat memengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran dan pencapaian kegiatan.

Rencana yang tertunda menjadi semakin bermasalah apabila kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan yang saling bergantung. Ketika satu kegiatan tidak dilaksanakan sesuai jadwal, keluaran yang seharusnya dihasilkan juga tidak tersedia pada waktu yang telah ditentukan. Keterlambatan keluaran selanjutnya dapat menunda kegiatan lain yang menggunakan keluaran tersebut sebagai masukan. Penundaan juga dapat menyebabkan penumpukan beban kerja, perubahan prioritas, peningkatan kebutuhan revisi, serta bergesernya target ke tahun anggaran berikutnya. Dalam konteks sektor publik, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi

pelayanan kepada masyarakat karena pelaksanaan kegiatan terikat pada target tahunan, standar pelayanan, dan kebutuhan pengguna layanan.

Permasalahan tersebut relevan dengan penyelenggaraan administrasi pertanahan di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Administrasi pertanahan membutuhkan keterhubungan antara data yuridis dan data fisik bidang tanah. Data fisik mengenai letak, batas, bentuk, posisi, dan luas bidang tanah diperoleh melalui kegiatan survei, pengukuran, pemetaan, pengolahan data, pemeriksaan, serta pengendalian kualitas. Data tersebut selanjutnya digunakan dalam pendaftaran tanah, penetapan hak, pemeliharaan data, pemecahan dan penggabungan bidang, pengembalian batas, serta berbagai layanan pertanahan lainnya. Dengan demikian, kegiatan survei dan pemetaan bukan sekadar kegiatan pendukung, tetapi merupakan bagian penting dari pembentukan dan pemeliharaan data administrasi pertanahan.

Artika dan Utami (2020) menunjukkan bahwa survei data pertanahan dan pengolahan data spasial dapat mempercepat identifikasi bidang tanah yang telah bersertipikat tetapi belum terpetakan dalam basis data Geo-KKP. Kegiatan tersebut juga memberikan kejelasan terhadap bidang tanah yang belum terintegrasi dan menjadi dasar bagi perencanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Handono, Suhattanto, dan Nugroho (2020) juga menemukan bahwa peningkatan kualitas data pertanahan dalam volume besar membutuhkan strategi pelaksanaan, pembagian pekerjaan, metode yang tepat, dan pengendalian hasil. Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas administrasi pertanahan sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kegiatan lapangan, pengolahan data, ketersediaan sarana, dan kemampuan organisasi mengendalikan pekerjaan.

Salah satu unit yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Seksi Survei dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020, Seksi Survei dan Pemetaan bertugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar

kadastral nasional, pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan tematik, serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi. Pelaksanaan tugas tersebut mencakup pekerjaan administratif di kantor dan pekerjaan teknis di lapangan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kegiatan Seksi Survei dan Pemetaan mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap dukungan anggaran dan sarana teknis. Petugas membutuhkan alat ukur yang layak dan terkalibrasi, komputer pengolah data, perangkat lunak pemetaan, jaringan, media penyimpanan, bahan operasional, alat pelindung diri, serta dukungan mobilitas untuk mencapai lokasi bidang tanah. Setelah kegiatan lapangan selesai, data masih harus diolah, dihitung, digambar, diperiksa, divalidasi, dan dimasukkan ke dalam sistem informasi pertanahan. Apabila salah satu tahapan tertunda, penyelesaian tahapan berikutnya juga dapat mengalami keterlambatan.

Kebutuhan terhadap dukungan data dan sarana yang memadai semakin penting karena Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman telah menjalankan layanan pertanahan elektronik. Ardian dan Wibowo (2025) menemukan bahwa proses validasi data spasial pada layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman masih menghadapi kendala berupa masalah teknis aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta kebutuhan mendesak terhadap peta lengkap yang berkualitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebelum memperhitungkan dampak kebijakan efisiensi sekalipun, pelaksanaan layanan pertanahan di Sleman telah membutuhkan dukungan teknis, sumber daya manusia, dan kualitas peta yang memadai. Pembatasan terhadap kegiatan pemetaan, pemeliharaan perangkat, atau peningkatan kualitas data berpotensi memperbesar kesenjangan antara kebutuhan layanan elektronik dan kapasitas unit kerja.

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada Kementerian ATR/BPN kemudian menuntut unit kerja di daerah untuk menyesuaikan rencana belanja dan kegiatan. Penyesuaian tersebut tidak dapat dipandang seragam karena setiap unit memiliki karakter pekerjaan, sumber pembiayaan, target, dan

kebutuhan operasional yang berbeda. Seksi Survei dan Pemetaan merupakan unit yang penting dikaji karena sebagian kegiatannya bersifat rutin dan berbasis permohonan masyarakat, sedangkan sebagian lainnya berbentuk program pemetaan strategis yang sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah. Perbedaan sumber pembiayaan tersebut berpotensi menghasilkan dampak efisiensi yang tidak sama antara layanan pengukuran reguler dan kegiatan pemetaan strategis.

Berdasarkan penelusuran awal terhadap dokumen anggaran dan informasi di lokasi penelitian, kebijakan efisiensi pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman menimbulkan perubahan pada sejumlah komponen. Sekitar 50 persen anggaran layanan pengukuran ditahan pada awal tahun dan dibuka secara bertahap sesuai kebutuhan. Anggaran kegiatan peta foto tegak diblokir sepenuhnya sepanjang tahun 2025. Target layanan pengukuran bidang tanah dengan luas kurang dari 25 hektare turun dari 10.000 menjadi 9.400 bidang pada tahun 2025, kemudian dari 9.500 menjadi 4.750 bidang pada tahun 2026. Penurunan yang lebih besar terjadi pada target Peta Bidang Tanah PTSL oleh pihak ketiga, yaitu dari 18.000 hektare menjadi 1.478 hektare. Selain itu, pengadaan perangkat kerja, perbaikan berat, kalibrasi alat ukur, dan pembaruan perlengkapan lapangan juga mengalami penundaan.

Data tersebut menunjukkan adanya masalah empiris yang perlu dianalisis lebih dalam. Pemangkasan tidak hanya terjadi pada pengeluaran administratif, tetapi juga menyentuh kegiatan dan sarana yang berhubungan langsung dengan pemetaan, pengolahan data, ketelitian alat, dan keselamatan kegiatan lapangan. Pemblokiran peta foto tegak menyebabkan perluasan peta dasar tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, sedangkan penurunan target PTSL mengurangi cakupan pemetaan sistematis. Pada saat yang sama, layanan pengukuran reguler masih harus berjalan karena permohonan masyarakat tetap masuk dan membutuhkan penyelesaian. Kondisi tersebut memaksa Seksi Survei dan Pemetaan menetapkan ulang prioritas serta memusatkan sumber daya pada kegiatan yang masih memiliki dukungan pembiayaan.

Fenomena tersebut juga menunjukkan bahwa dampak efisiensi anggaran tidak cukup dianalisis hanya dari perubahan jumlah anggaran. Penurunan anggaran pada layanan reguler belum tentu langsung menurunkan volume pekerjaan karena kegiatan tersebut didukung oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tetap berjalan berdasarkan permohonan masyarakat. Sebaliknya, kegiatan peta foto tegak dan PTSL yang bergantung pada anggaran satuan kerja dapat berhenti atau mengalami penurunan target secara tajam. Dengan demikian, satu kebijakan dapat menghasilkan dampak yang berbeda pada kegiatan yang berada dalam unit kerja yang sama. Perbedaan tersebut hanya dapat dijelaskan melalui identifikasi sumber pembiayaan, komponen yang menjadi objek efisiensi, karakter keluaran, serta strategi penyesuaian yang diterapkan oleh unit kerja.

Penelitian Rizky et al. (2025) mengenai efisiensi anggaran pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang menunjukkan bahwa layanan pertanahan masih dapat dipertahankan melalui pengurangan belanja operasional, optimalisasi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah. Meskipun demikian, penelitian tersebut juga mengingatkan bahwa pengurangan anggaran secara berkelanjutan dapat memengaruhi kapasitas kantor pertanahan dalam memberikan layanan secara optimal. Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan adaptasi organisasi, tetapi kajiannya masih berfokus pada pelayanan pertanahan secara umum dan iklim investasi. Kajian tersebut belum secara khusus membandingkan kondisi sebelum dan setelah efisiensi pada unit teknis survei dan pemetaan maupun mengidentifikasi kegiatan yang mengalami pemblokiran, pengurangan target, penundaan pemeliharaan, dan perubahan komposisi keluaran.

Kajian mengenai efisiensi anggaran pada umumnya juga lebih banyak menilai tingkat realisasi, efisiensi belanja, akuntabilitas, atau kinerja organisasi secara agregat. Kajian semacam itu belum sepenuhnya menjelaskan proses terjadinya dampak pada unit teknis yang kegiatannya berbasis lapangan dan membutuhkan teknologi serta peralatan khusus. Padahal, besarnya persentase

pengurangan anggaran pada tingkat kementerian belum tentu menggambarkan dampak yang sama pada setiap unit kerja. Suatu unit dapat mempertahankan layanan rutin, tetapi pada saat yang sama kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan strategis, memperluas basis data, memelihara peralatan, atau mencapai target jangka panjang.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang tidak hanya menilai berapa besar anggaran yang dipangkas, tetapi juga menjelaskan kondisi unit kerja sebelum kebijakan, komponen anggaran dan kegiatan yang menjadi objek efisiensi, serta kondisi yang terbentuk setelah kebijakan dilaksanakan. Kondisi sebelum efisiensi diperlukan sebagai dasar pembandingan untuk mengetahui struktur pembiayaan, target, sarana, sumber daya manusia, dan pelaksanaan kegiatan pada keadaan awal. Identifikasi objek efisiensi diperlukan untuk mengetahui bagian anggaran atau kegiatan yang dikurangi, diblokir, ditunda, dialihkan, atau diprioritaskan kembali. Adapun kondisi setelah efisiensi perlu dianalisis untuk mengetahui perubahan pelaksanaan kegiatan, pencapaian target, penggunaan sarana, keberlanjutan layanan, serta strategi adaptasi unit kerja.

Perbandingan tersebut penting agar penilaian terhadap kebijakan tidak berhenti pada asumsi bahwa setiap pemotongan merupakan efisiensi atau bahwa setiap peningkatan keluaran merupakan keberhasilan kebijakan. Peningkatan jumlah pekerjaan rutin, misalnya, perlu ditelaah apakah benar berasal dari metode kerja yang lebih efisien atau hanya karena tenaga dialihkan dari program strategis dan difokuskan untuk menyelesaikan tunggakan. Demikian pula, keberhasilan mempertahankan layanan perlu dikaji apakah didukung oleh kapasitas institusi yang memadai atau justru bergantung pada penggunaan peralatan lama, perangkat pribadi pegawai, dan penundaan kebutuhan pemeliharaan.

Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif komparatif

dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah kebijakan serta mengidentifikasi komponen anggaran dan kegiatan yang menjadi objek efisiensi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai apakah kebijakan efisiensi benar-benar menghasilkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal atau justru menyebabkan tertundanya kegiatan teknis, berkurangnya target pemetaan strategis, dan meningkatnya risiko terhadap pencapaian sasaran administrasi pertanahan dalam jangka panjang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana kondisi Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebelum diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran?
2. Komponen anggaran dan kegiatan apa saja yang menjadi objek efisiensi pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana kondisi Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sebelum diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis komponen anggaran serta kegiatan yang menjadi objek efisiensi pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis kondisi Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah diterapkannya kebijakan efisiensi anggaran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoretis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperkaya kajian di bidang administrasi pertanahan dan pengelolaan anggaran sektor publik, khususnya mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran pada unit kerja teknis pertanahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi unit kerja sebelum dan setelah efisiensi anggaran, komponen anggaran dan kegiatan yang menjadi objek efisiensi, serta perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas Seksi Survei dan Pemetaan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas efisiensi anggaran pada instansi pemerintah atau unit kerja teknis lainnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, khususnya Seksi Survei dan Pemetaan, dalam menilai pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran, mengidentifikasi komponen anggaran dan kegiatan yang terdampak, serta menyusun prioritas anggaran yang tetap mendukung pelaksanaan tugas teknis pertanahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam merumuskan kebijakan efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran dan memperhatikan kebutuhan operasional unit kerja di daerah. Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menganalisis kebijakan anggaran sektor publik serta menjadi sarana penerapan pengetahuan akademik terhadap permasalahan nyata di lingkungan instansi pemerintah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan

perbandingan, dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji kebijakan efisiensi anggaran, administrasi pertanahan, maupun pelaksanaan kegiatan teknis pemerintahan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak kebijakan efisiensi anggaran pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Sebelum kebijakan efisiensi anggaran diterapkan, pelaksanaan kegiatan Seksi Survei dan Pemetaan berada dalam kondisi relatif stabil. Anggaran dapat digunakan sesuai perencanaan awal tanpa pemblokiran, layanan pengukuran reguler berjalan melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan target pekerjaan secara umum dapat dicapai. Kegiatan pemetaan dasar juga masih berlangsung dengan cakupan peta foto tegak sekitar 42–45% dari wilayah Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, sejak sebelum efisiensi telah terdapat keterbatasan berupa jumlah petugas internal, kendaraan operasional, serta penggunaan sebagian peralatan pribadi oleh petugas.
2. Objek efisiensi meliputi anggaran layanan pengukuran, kegiatan peta foto tegak dan PTSL, belanja modal, pemeliharaan serta kalibrasi alat ukur, bahan operasional, perangkat pengolahan data, dan perlengkapan kegiatan lapangan. Penyesuaian tidak dilakukan secara merata, tetapi terutama diarahkan pada komponen dengan alokasi anggaran besar. Anggaran layanan pengukuran ditahan sekitar 50% pada awal tahun, kegiatan peta foto tegak diblokir sepenuhnya pada tahun 2025, sedangkan target Peta Bidang Tanah PTSL oleh pihak ketiga turun dari 18.000 hektare menjadi 1.478 hektare. Jumlah pegawai dan pembagian tugas tidak menjadi objek pengurangan secara langsung.
3. Setelah efisiensi diterapkan, layanan pengukuran reguler tetap berjalan dan akurasi hasil masih dapat dipertahankan melalui prosedur teknis serta penguatan kendali mutu. Volume pengukuran meningkat karena adanya penyelesaian tunggakan pekerjaan, tetapi peningkatan tersebut

bukan merupakan dampak langsung yang positif dari efisiensi. Pada saat yang sama, kegiatan pemetaan strategis mengalami penurunan yang nyata, ditandai dengan tidak terlaksananya peta foto tegak dan PTSL pada tahun 2025, berkurangnya target kegiatan, tertundanya kalibrasi dan perbaikan alat, serta terbatasnya pengadaan perangkat dan perlengkapan lapangan.

Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran tidak menghentikan seluruh kegiatan Seksi Survei dan Pemetaan, tetapi mengubah prioritas dan komposisi pekerjaannya. Layanan rutin yang didukung oleh PNBPN relatif dapat dipertahankan, sedangkan kegiatan strategis yang sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah mengalami dampak paling besar. Oleh karena itu, efisiensi anggaran belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan efisiensi organisasi karena sebagian penghematan dilakukan melalui penundaan kebutuhan teknis yang tetap diperlukan. Keberhasilan kebijakan seharusnya tidak hanya dinilai dari jumlah anggaran yang dikurangi, tetapi juga dari kemampuan unit kerja mempertahankan kegiatan teknis, kualitas data pertanahan, keselamatan petugas, dan pencapaian sasaran pemetaan jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman perlu menetapkan objek efisiensi secara lebih selektif dengan memprioritaskan pengurangan pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan tugas teknis. Anggaran untuk pemetaan dasar, pemeliharaan dan kalibrasi alat ukur, perangkat pengolahan data, serta alat pelindung diri perlu tetap dijaga karena berhubungan dengan ketelitian hasil, kelancaran pekerjaan, dan keselamatan petugas lapangan.
2. Perencanaan anggaran layanan pengukuran perlu disusun berdasarkan jumlah permohonan, tunggakan pekerjaan, kapasitas petugas, dan kebutuhan riil kegiatan. Penahanan maupun pembukaan anggaran

secara bertahap harus dilakukan melalui mekanisme yang jelas agar pekerjaan yang telah diselesaikan dapat dibayar tepat waktu dan tidak menimbulkan kekurangan anggaran pada akhir tahun.

3. Kementerian ATR/BPN dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu memberikan perhatian khusus terhadap kegiatan peta foto tegak dan PTSL. Apabila efisiensi tetap harus dilakukan, pengurangan sebaiknya dilaksanakan secara bertahap berdasarkan wilayah dan kegiatan prioritas agar pembangunan data pertanahan tidak berhenti sepenuhnya serta target pemetaan jangka panjang tetap dapat dicapai.
4. Seksi Survei dan Pemetaan perlu mempertahankan strategi penyesuaian yang telah berjalan, seperti penetapan skala prioritas, penggabungan kegiatan lapangan, pemanfaatan teknologi, dan penguatan kendali mutu. Namun, penggunaan alat lama dan perangkat pribadi pegawai tidak seharusnya dijadikan solusi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi kondisi sarana secara berkala sebagai dasar perencanaan perbaikan, kalibrasi, dan pengadaan peralatan pada tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Jurnal dan Buku

- Ardian, M., & Wibowo, H. Y. (2025). Evaluasi proses validasi data spasial pada layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 8(1), 37–44. <https://doi.org/10.22146/jgise.102069>
- Artika, I. G. K., & Utami, W. (2020). Percepatan pembenahan data bidang tanah Kluster 4 melalui survei data pertanahan. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1), 66–79. <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.425>
- Azzahro, F., Erasandi, S., Kusumaningrum, N. D., & Maghfiroh, E. L. (2024). The effect of budget efficiency on the accountability of local government agency performance. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 9(2), 115–128. <https://tajb.unbin.ac.id/index.php/ajb/article/view/157>
- Badriyah, N. (2021). Budget efficiency on job satisfaction and employee performance. *Proceedings of the International Symposium on Management*. <https://insyma.org/proceedings/items/show/338>
- Bhattacharyya, D. S., Shafique, S., Akhter, S., & Rahman, A. (2020). Implementation of an information and communication technology-based human resources management tool in the government health sector in Bangladesh: Protocol for an exploratory qualitative study. *BMJ Open*, 10(12), e043939.
- Eskandar. (2022). Efektivitas pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 46–61. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i2.2651>
- Handono, A. B., Suhattanto, M. A., & Nugroho, A. (2020). Strategi percepatan peningkatan kualitas data pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. *Tunas Agraria*, 3(3). <https://doi.org/10.31292/jta.v3i3.125>
- Junarto, R., Djurdjani, D., Permadi, F. B., Ferdiansyah, D., Admaja, P. K., Sholikin, A. R., & Rahmansani, R. (2020). Pemanfaatan teknologi Unmanned Aerial

- Vehicle (UAV) untuk pemetaan kadaster. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(1). <https://doi.org/10.31292/jb.v6i1.428>
- Kumar, M. B., Taegtmeyer, M., & Madan, J. (2020). How do decision-makers use evidence in community health policy and financing decisions? *Health Policy and Planning*, 35(7), 799–810.
- Kusuma, S. I., Pambudi, S. B., & Suprayitno, A. W. (2019). Standar biaya dan kinerja: Pengaruh SBKK terhadap efisiensi anggaran kementerian/lembaga. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1(1), 51–70. <https://doi.org/10.33827/akurasi2019.vol1.iss1.art45>
- Mahfudin. (2018). Efektivitas kebijakan standar biaya perjalanan dinas dalam menunjang kinerja kementerian negara/lembaga. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 2(2), 53–68. <https://doi.org/10.33827/akurasi2018.vol2.iss2.art39>
- Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik. UPP STIM YKPN.
- Mangkunegara, A. A. P. (2020). Manajemen sumber daya manusia perusahaan. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Andi.
- Marsselia, S., & Fitrihuri. (2025). Analisis persepsi efisiensi anggaran terhadap kinerja pegawai pada Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 2(6), 259–265. <https://doi.org/10.62017/jemb>
- Milenia, A. F., Sibarani, J. L., & Hidayat, A. (2022). Analisis efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran sebagai pengukuran kinerja pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. *JAKP: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 5(2), 105–113.
- Moeheriono. (2021). Pengukuran kinerja berbasis kompetensi. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2021). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyani, F. S. P., Fahmi, M. P., Wulandari, S., Rasyid, Y., & Ahyaruddin, M. (2022). Determinan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah dengan

- peran komitmen pimpinan sebagai pemoderasi. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 33–52. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.12837>
- Nalien, E. M. (2021). Faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan bureaucratic trimming di Pemerintahan Kota Bukittinggi. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1622>
- Pahwa, M., & Cavanagh, A. (2023). Key informants in applied qualitative health research. *Qualitative Health Research*.
- Pinuji, S. (2020). Perubahan iklim, sustainable land management, dan responsible land governance. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 6(2), 188–200. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v6i2.430>
- Rahayu, M. J., & Widyastuti, S. (2021). Dampak kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan PKL di Kota Jakarta, Bandung, dan Surabaya. *TATALOKA*, 23(2), 201–211. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.201-211>
- Rahma, M. S. (2025). Pengaruh efisiensi anggaran tahun 2025 terhadap kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Subang [Skripsi, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional].
- Rakhmadina, D., & Setyaningrum, D. (2021). Dampak e-learning terhadap anggaran pelatihan Kementerian Keuangan. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 14–32. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.10343>
- Rizky, G. M., Tanzil, V. J., Pasara, A. R. D., Kusumo, R., & Tiasono, E. J. (2025). Dampak efisiensi anggaran pada ATR/BPN Kota Tangerang: Optimalisasi layanan pertanahan dan iklim investasi. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 9(2), 326–342. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/4670>
- Salman, D., & Ikbali, M. (2020). Analisis efektivitas kebijakan efisiensi anggaran. *Journal of Economics Development Research*, 4(1), 45–56. <https://ejournal.gemacendekia.org/index.php/joeder/article/view/99>
- Setiawan, D., & Ramdan, K. N. (2024). Pengaruh realisasi anggaran, efisiensi anggaran, dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja

- Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(3), 80–98.
- Setiawan, I., Sururama, R., & Nurdin, I. (2022). Implementasi kebijakan penyederhanaan organisasi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(1), 12–25. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2380>
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sutaryono, S., et al. (2021). Transformasi digital dan tantangan implementasi pertanahan di Indonesia. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 7(2), 145–160.
- Yulianto, E. S., & Farid, A. H. (2020). Kajian akurasi pengukuran dan pemetaan bidang tanah produk Kantor Jasa Surveyor Berlisensi: Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri dan Tulungagung. Tunas Agraria, 3(2), 140–156. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.113>
- Zarita, S. S., Agustian, K., Muhammad, Novriza, F., & Saputra, H. (2025). Assessing the effect of budget efficiency on educational staff performance in public universities of West Aceh Regency. Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan, 9(2), 704–708. <https://doi.org/10.29240/jsmp.v9i2.148642025>

B. Peraturan dan Sumber Resmi

- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (t.t.). Struktur anggaran: Unsur penting dalam pengelolaan keuangan negara. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/struktur-anggaran-unsur-penting-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2020). Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2025). Dokumen anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2025.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pemerintah Kabupaten Sleman. (t.t.). Profil Kabupaten Sleman. Diakses pada 21 Mei 2026, dari <https://slemankab.go.id/profil-ppid/>

Presiden Republik Indonesia. (2024a). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Presiden Republik Indonesia. (2024b). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Presiden Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.